

Masalah Kredit TRI bagi Petani Tebu di Kabupaten Sleman dan Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta¹

Oleh
Tim Peneliti FE UII²

1. Pendahuluan

Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, komoditi gula merupakan salah satu komoditi andalan. Pada masa tersebut (1863), cara bercocok tanam tebu dilakukan dilahan sawah yang subur dan beririgasi baik (sistem Reinoso). Dengan sistem reinosaini dicapai puncak produksi gula sebesar 181.600 ton (1863) dengan areal yang ditanami seluas 28.500 Ha. Setelah dikeluarkannya UU Agraria 1878, pabrik gula menyewa lahan dari rakyat selama 21,5 tahun untuk ditanami tebu. Setiap dua tahun sekali lahan yang disewa oleh pabrik gula dikembalikan kepada pemilik lahan untuk digarap Dalam peraturan tersebut (sistem glebagan), lahan petani dibagi menjadi tiga bagian. Satu bagian diserahkan kepada pabrik gula, dan dua bagian diserahkan kepada pemilik untuk digarap. Oleh karena tanaman tebu berumur 18 bulan (klon lama), maka bagian yang digarap hanya satu bagian. Dengan sistem glebagan, masa keemasan gula terjadi pada tahun 1930, dengan 179 pabrik gula yang beroperasi pada lahan seluas 196.592 Ha dan tingkat produktivitas sebesar 14,3 ton

per Ha. Kemampuan produksi gula yang dicapai tersebut menempatkan Indonesia sebagai produsen gula nomor dua setelah Kuba, dan mampu mengekspor gula sejumlah 2 juta ton (1931). Keberhasilan tersebut didukung oleh manajemen, bibit unggul, sewa tanah murah, upah tenaga kerja murah, dan transportasi yang menunjang. Tetapi, keberhasilan tersebut tidak diikuti oleh perbaikan kesejahteraan karyawan dan buruh pabrik gula serta petani pemilik lahan (Mubyarto, 1991).

Akibat dari depresi ekonomi (1933), perang kemerdekaan dan pergolakan politik, produksi gula mengalami masa suram. Maka tahun 1963 pemerintah Indonesia melakukan *pilot project* penanaman tebu dengan sistem bagi hasil, dan dikeluarkan peraturan menteri pertanian dan agraria (SK 3 dan SK 4). Dalam SK3 dan SK4, pembagian hasil bagi gula antara pabrik dan pemilik lahan diatur, tetapi pelaksanaan peraturan tersebut mengalami hambatan, bahkan sejak tahun 1967 Indonesia berbalik menjadi pengimpor gula. Akhirnya, pabrik gula kembali menggunakan sistem sewa.

-
1. Artikel ini merupakan hasil penelitian yang dilakukan oleh Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, Fakultas Ekonomi, UII, dan bekerja sama dengan Bank Bukopin Cabang Yogyakarta.
 2. Tim Peneliti adalah Drs. Eddy Suandi Hanid, M.Ec; Drs. Usman Thoyib, M.M.; Drs. Muslich, M.M.; Drs. H. Kumala Hadi, M.S., Ak; Drs. Zainal Mustafa El Qodri, M.M.; Drs. Unggul Priyadi; dan Drs. Awan Setya Dewanta.

Untuk menghindari sistem sewa dan meningkatkan kesejahteraan petani, maka pemerintah mengeluarkan Inpres No 9 tahun 1975 yang mengatur penanaman tebu dengan sistem TRI (Tebu Rakyat Intensifikasi). Tujuan dari sistem TRI ini adalah (1) mengalihkan pengusahaan tebu yang semula berada di tangan pabrik gula dengan sistem sewa ke tangan petani yang harus mengusahakan sendiri tanaman tebu di atas lahannya, (2) memperbaiki penghasilan petani tebu dengan meningkatkan produktivitas melalui pengelolaan usaha tani yang lebih intensif, dan (3) menjamin peningkatan dan kemandapan produksi gula.

Diberlakukannya sistem TRI, selama periode 1975 - 1990 luas areal tanaman tebu meningkat sebesar 2,12% per tahun untuk areal tanaman pabrik gula dan 17,40% per tahun untuk areal tanaman rakyat. Dengan laju kenaikan tersebut, luas areal tanaman tebu, yang pada tahun 1975 sebesar 83.295 Ha, menjadi 114.168,9 Ha (1990), sedangkan luas tanaman tebu rakyat, yang sebesar 21.482,0 Ha (1975), menjadi 238.210,2 Ha (1990). Kenaikan luas areal tanaman tebu di Jawa (87,5%) disebabkan oleh kenaikan luas areal tanaman tebu di lahan sawah yang sebesar 9,6% per tahun (1975-1983) dan di lahan kering yang sebesar 133,8% per tahun³. Tetapi kenaikan areal tersebut tidak dapat diimbangi oleh kenaikan produksi (hablur) yang hanya sebesar 5,07% per tahun. Ini berarti bahwa kenaikan produksi gula lebih disebabkan oleh ekstensifikasi tebu rakyat yang menuju lahan-lahan marginal dengan produktivitas yang rendah.

Pada sisi lain, gula menjadi salah satu kebutuhan pokok penduduk, sehingga pemerintah berusaha untuk penyediaan gula

dengan harga gula yang terjangkau bagi masyarakat. Untuk usaha tersebut pemerintah direpotkan oleh penyediaan lahan tanaman tebu. Apabila hal ini tidak diimbangi oleh peningkatan teknologi budidaya tebu dan efisiensi produksi, maka produksi gula di dalam negeri lebih lambat dibandingkan dengan kenaikan kebutuhan gula dalam negeri.

2. Permasalahan dan Tujuan Penelitian

Kondisi tersebut di atas mengakibatkan pabrik gula mcrasakawatir terhadap ketersediaan lahan bagi tanaman tebu yang semakin kurang ekonomis dibandingkan tanaman lainnya dan rendahnya produktivitas. Untuk mengamankan dan tersedianya bahan baku giling, maka pejabat pemerintah setempat dilibatkan dalam penyediaan lahan tebu. Akibatnya, mekanisme pasar pada komoditi gula tidak berjalan. Petani, yang memiliki lahan untuk diarealkan "wajib" tanam atau "tradisional tanaman tebu", berkorban dengan menyerahkan tanahnya untuk ditanami tebu, meskipun petani tersebut merasa rugi. Pengorbanan petani tersebut bertambah lagi dengan munculnya petani (oknum pengurus KUD, kelompok tani, petani kaya) yang membeli atau nyewa lahan petani pemilik di bawah tangan. Petani pemilik tidak lagi menjadi pengusaha dilahan sendiri. Akibatnya, kredit TRI, yang bertujuan untuk membantu pengerjaan tanaman tebu, dimanfaatkan untuk kepentingan lainnya.

Bagi bank penyelenggara kredit TRI (BRI), munculnya petani "baru" tersebut mengakibatkan resiko

3. Luas lahan sawah masih mendominasi areal tebu. Kenaikan luas areal tanaman tebu di lahan sawah dari 99,53 Ribu Ha menjadi 207,87 Ribu Ha dan di lahan kering dari 4,51 Ribu Ha menjadi 59,83 Ribu Ha.

pengembalian kredit menjadi tinggi. Tunggakan kredit tidak dapat dielakkan. Tunggakan tersebut semakin membengkak dengan munculnya tebu tamasya (keluar daerah) dan petani fiktif. Akibatnya, bank penyelenggara dibebani tunggakan kredit TRI. Bank penyelenggara (Bukopin dan BRI) menghadapi dilema, yaitu pada satu sisi Bank mempunyai misi menolong petani yang umumnya berpendapatan rendah dan tidak mempunyai jaminan yang cukup bagi pinjamannya, dan pada sisi lain bank harus meminjamkan dananya sedemikian rupa sehingga modalnya aman. Disamping bank penyelenggara, pabrik gula juga menghadapi dilema, yaitu pada satu sisi pabrik gula harus meningkatkan efisiensi produksi, dan sisi lainnya meningkatkan produktifitas tebu rakyat di lahan marginal.

Pada sisi petani yang terutama pada berlahan sempit, kredit TRI tersebut tidak hanya digunakan untuk memelihara tanaman tebu saja. Sebagian kredit TRI tersebut dipergunakan juga untuk perusahaan tanaman lain atau menjualnya kepada "petani" lain (ijon) untuk menutup kerugian yang ditimbulkan oleh tanaman tebu. Akibatnya, produktivitas tanaman tebu menurun dan tidak dapat menutup kredit TRI.

Maka, penelitian ini bertujuan untuk (1) Mengetahui pemanfaatan kredit TRI bagi usaha tani yang dilakukan oleh petani peserta TRI, (2) Mengetahui peran lembaga perbankan dalam mendukung program TRI dan mempengaruhi pelaku petani TRI, dan (3) Menilai dan mencari bentuk mekanisme kerja yang saling menguntungkan antara petani TRI dengan lembaga/instansi yang terlibat dalam program TRI.

Hasil penelitian ini diharapkan

dapat dipergunakan untuk memberikan saran kepada bank penyelenggara (Bank Bukopin) dalam menyalurkan kredit TRI dengan efektif dan efisien, serta menciptakan mekanisme kerja yang saling menguntungkan dan saling membantu meningkatkan produktivitas petani tebu.

3. Tinjauan Pustaka

Kebijakan pergulaan tersebut belum mampu menjadikan petani tebu menjadi pengusaha tebu di lahannya (Mubyarto, 1991). Petani dalam pengadaan tebu hanya terbatas sebagai pihak yang menyewakan lahan dan bekerja pada lahan milik sendiri sebagai buruh kasar usahatani tebu yang dikelola pabrik gula (PG)⁴.

Dalam perkembangannya pabrik gula dihadapkan kepada kesulitan untuk mendapatkan lahan untuk disewa. Hal ini disebabkan petani senantiasa meningkatkan harga sewa tanahnya agar pendapatan sewa yang diterima sepadan dengan *opportunity cost* jika tanah tersebut ditanami tanaman lain yang cocok, seperti padi, tembakau, bawang merah atau pun tanaman pangan yang lain. Pada sisi lain pabrik gula memiliki ketidakmampuan untuk meningkatkan harga sewa tanah, oleh karena harga jual gula ditetapkan oleh pemerintah dan kekakuan fungsi produksi yang dimilikinya. Akibatnya adalah hubungan antara petani dan pabrik gula kurang harmonis.

Dalam upaya mengatasi berbagai permasalahan yang ada, pada tahun 1975, pemerintah mengambil kebijakan baru yang dituangkan dalam bentuk Instruksi Presiden No.9/1975. Tujuan yang termuat dalam kebijakan tersebut adalah untuk

4. Dalam memenuhi bahan baku gula, pabrik gula menyewa lahan rakyat disamping kebun milik pabrik gula.

mengadakan perombakan sistem perkebunan tebu yang didasarkan atas sistem persewaan tanah rakyat menjadi sistem tebu rakyat dengan petani menjadi "pengusaha" tebu di lahannya sendiri. Dengan demikian, inpres ini menegaskan penempatan petani sebagai produsen tebu utama. Petani menanam tebu sendiri di atas lahan sendiri, dan pabrik gula bertindak sebagai pimpinan kerja di lapangan sekaligus menjadi pengolahnya.

Disamping itu, dalam upaya mendorong petani untuk lebih mengamankan persediaan tebu melalui program TRI, pemerintah memberikan rangsangan atas produksi gula yang dihasilkan oleh petani melalui ketentuan bagi hasil yang lebih menarik dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Pertanian/Ketua Badan Pengendali Bimas Nomor 03/SK/Mentan/Bimas/VI/1987. Salah satu isi dari keputusan tersebut adalah memberikan progresifitas pembagian hasil produksi antara petani dan pabrik gula. Petani yang mampu menghasilkan produksi gula dengan rendemen yang semakin tinggi maka bagi hasil yang diterima oleh petani akan semakin tinggi (Ahmad Supriyadi, 1992:58).

Selain ketentuan tentang progresifitas pembagian hasil produksi gula dan rendemen, pembagian hasil sampingan petani dan mekanisme pembayaran produksi gula ke petani juga diatur. Hasil sampingan yang berupa bagian petani tebu sebanyak 1,86 kg tetes untuk setiap ku tebu dengan harga sesuai ketetapan pabrik gula. Pembayaran hasil produksi gula yang dihasilkan oleh petani akan diterima setelah dipotong utang kepada bank serta membayar biaya-biaya lain. Harga yang akan dibayar oleh pabrik kepada petani

ditetapkan oleh pemerintah dengan surat keputusan (SK).

Dalam pelaksanaan, program TRI dikelola melalui koordinasi Bimas. Pelaksanaan dilapangan melibatkan lembaga-lembaga perbankan dalam hal ini BRI dan BUKOPIN, KUD dan pabrik gula. BRI dan BUKOPIN berperan sebagai pemberi kredit kepada petani TRI⁵. Pada awal program TRI ini, kredit dari bank (BRI dan BUKOPIN) disalurkan langsung kepada petani atas dasar rekomendasi pabrik gula. Sistem ini berlangsung sampai dengan tahun 1981. Setelah itu, terjadi perubahan penyaluran kredit dengan melibatkan KUD atau Kelompok Tani. Pelibatan KUD dan kelompok tani menimbulkan konsekuensi berupa kepercayaan petani tebu terhadap KUD atau kelompok tani. Beberapa kasus menunjukkan bahwa petani tebu menaruh kecurigaan terhadap pengurus KUD yang melakukan manipulasi pembayaran hasil produksi anggotanya. Tetapi pada sisi lain, pemanfaatan KUD dan kelompok tani ini akan meningkatkan kemampuan menawar petani dan memudahkan koordinasi⁶. Kondisi tersebut akan terjadi bila KUD merupakan alat perjuangan aspirasi anggotanya (Mubyarto, 1990). Disamping berperan sebagai penyalur kredit, KUD mempunyai tanggung jawab terhadap kelancaran usahatani tebu dengan menyalurkan saprodi, melaksanakan pendaftaran petani calon peserta TRI, membina kelompok tani, melaksanakan penebangan dan pengangkutan,

5. Tingkat bunga yang dibayarkan bervariasi antara 0,625 - 1,25% per bulan, dan dibayarkan setelah tebu selesai digiling.

6. Pertanian tebu telah bersifat kolektif sehingga kelompok tani dan KUD merupakan alat bagi perjuangan aspirasi anggotanya dalam meningkatkan kesejahteraannya.

menyaksikan penimbangan tebu penentuan rendemen di pabrik, serta menjual gula bagian petani kepada sub-Dolog⁷.

Dalam usaha meningkatkan pendapatan petani tebu melalui program TRI mengalami beberapa kendala yang perlu ditangani secara seksama. Salah satu permasalahan pergulaan adalah produktivitas tebu yang rendah. Rendahnya produktivitas ini berkaitan dengan tingkat kesuburan lahan, penerapan kultur teknis, pengelolaan petani. Produktivitas tanaman tebu tersebut diukur pula berapa banyak tanaman tebu tersebut bisa menghasilkan gula? Nilai kandungan gula tersebut dinamakan rendemen⁸. Bila dikatakan bahwa rendemen tebu 10 %, artinya ialah bahwa dari 100 kg tebu yang digilingkan di Pabrik Gula akan diperoleh 10 kg gula.

Nilai rendemen, yang dihasilkan dari suatu lahan tebu, tidak akan terlepas dari daur kehidupan tebu mulai dari fase perkecambahan, fase pertunasan, fase pemanjangan batang, fase kemasakan dan diakhiri dengan fase kematian. Fase kemasakan merupakan fase yang terjadi setelah pertumbuhan vegetatif menurun dan sebelum batang tebu mati. Pada fase ini gula di dalam batang tebu mulai terbentuk hingga titik optimal. Setelah titik optimal tercapai rendemen berangsur-angsur akan menurun. Tahap pemasakan inilah yang disebut dengan tahap penimbunan rendemen gula⁹.

Selain usaha tani tebu yang dilakukan oleh petani, keberhasilan peningkatan produksi gula dilakukan pula oleh pabrik gula dan bank penyalur kredit TRI. Keterpaduan ketiga pelaku tersebut merupakan kunci utama bagi kesuksesan usaha tani tebu. Pihak petani melaksanakan

Sapta Usaha Tani, sedangkan pihak pabrik melakukan ketepatan jadwal tebang, angkut, giling pada saat optimal rendamen, dan memperpendek masa giling (Juni-Agustus) dengan mesin yang lebih efisien (Hatta Sunanto, 1993). Pihak bank mampu menyediakan dana murah dan kemudahan usaha tani tebu¹⁰.

4. Metodologi

Untuk memperoleh solusi permasalahan program TRI diperlukan keterkaitan dan kerja sama antara petani TRI dan lembaga atau instansi yang mendukung, yaitu : kelompok tani TRI, KUD, Muspida setempat, pabrik gula, Departemen Pertanian (Disbun), dan Bank

7. Peranan pabrik gula dalam program TRI adalah menyediakan bibit tebu, pimpinan kerja, memberikan bimbingan teknis di lapangan kepada para petani dan mengolah tebu yang telah dihasilkan oleh petani. Atas dasar fungsi pabrik gula sebagai pimpinan kerja di lapangan maka peranan pabrik gula sering disebut sebagai Pimpinan Kerja Operasional Lapangan (PKOL).

8. Nilai rendemen ini berkaitan dengan nilai pembelian gula dari pabrik gula.

9. Dalam menghitung rendemen, ada tiga tahapan perhitungan yaitu Rendemen Contoh, Rendemen Sementara, dan Rendemen Efektif. Rendemen Contoh adalah rendemen yang merupakan contoh yang dipakai untuk mengetahui apakah suatu kebun tebu sudah mencapai masak optimal atau belum. Rendemen sementara digunakan untuk menentukan bagi hasil gula, tetapi sifatnya masih sementara. Penentuan bagi hasil yang benar akan dipertimbangkan setelah rendemen nyata diketahui. Penghitungan rendemen sementara ini perlu dilakukan untuk memberi gambaran atau perkiraan kepada petani seberapa besar kira-kira penentuan bagi hasil gula nantinya. Rendemen efektif disebut juga rendemen nyata atau rendemen terkoreksi. Rendemen efektif adalah rendemen hasil perhitungan setelah tebu digiling habis dalam jangka waktu tertentu. Perhitungan rendemen efektif dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 15 hari, atau biasa disebut 1 periode giling.

10. Atau dengan kata lain, petani mempunyai tugas memproduksi tebu mencapai rendemen yang tinggi. Pabrik gula bertugas "mengamankan" hasil rendemen tebu yang dihasilkan oleh petani, dan bank bertugas memberikan fasilitas dan kemudahan pembiayaan usahatani tebu.

penyelenggara. Lembaga/instansi tersebut harus mampu memberikan iklim yang mendukung usaha tani tebu semakin ekonomis. Maka tim peneliti akan melakukan survey lapangan dengan melakukan wawancara terarah kepada petani, tokoh masyarakat, lembaga/instansi yang terkait, dan studi literatur untuk pengumpulan data sekunder dan hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan oleh lembaga-lembaga lain. Atas dasar hasil wawancara tersebut akan dapat dirumuskan mekanisme kerja antar lembaga atau instansi pendukung program TRI.

Wawancara dengan petani TRI akan dipilih secara random yang mewakili anggota KUD yang menunggak, anggota yang tidak menunggak, dan petani tebu non TRI. Jumlah petani yang dipilih secara acak terpilih sebanyak 150 orang yang mewakili kelompok peserta TRI dan 50 orang yang mewakili kelompok petani tebu Non TRI. Pelaksanaan lapangan dibantu oleh asisten lapangan. Hasil dari wawancara petani akan diperoleh informasi mengenai (1) Persepsi terhadap program TRI, (2) Pemanfaatan kredit dan pendanaan usaha tani, dan (3) Pelayanan yang dibutuhkan petani tebu untuk meningkatkan produktivitasnya.

5. Data dan Analisis

Dari hasil analisis data menunjukkan bahwa program TRI ini tetap perlu dilanjutkan dengan berbagai pembenahan yang meliputi isi program dan mekanisme organisasi pengelolaan program TRI, karena program ini masih merupakan alternatif "penolong" petani miskin. Program ini merupakan alternatif dan harapan meningkatkan pendapatan petani yang memiliki lahan sempit (petani gurem), tidak memiliki permodalan, dan memiliki lahan

marginal. Tetapi, hal tersebut belum menarik bagi petani melakukan untuk intensifikasi lahan tebu. Petani masih memerlukan pendapatan tambahan di luar tanaman tebu. Hal tersebut merupakan kendala bagi perkembangan program TRI sendiri, disamping kendala sosial ekonomi petani dan lahan yang dimilikinya.

Dilihat dari kondisi sosial-ekonomi, petani tebu, yang menjadi responden berumur produktif (62,6%), memiliki latar belakang pendidikan SD dan tidak sekolah (69,1%), dengan rata-rata jumlah keluarga yang harus ditanggung adalah 6 orang. Petani tebu tersebut menguasai rata-rata areal sebesar 1,4 Ha, dengan sebaran kurang dari 0,5 Ha (38,7%) dan 0,5-2,5 Ha (48,7%). Dari areal tersebut, rata-rata areal yang diusahakan tebu sebesar 1 Ha, dengan sebaran kurang dari 0,5 Ha (56,7%) dan 0,5-2,5 Ha (34,7%).

Bila hasil rendamen tebu adalah sekitar 7,1-7,8% dan produktivitas gula sebesar 55,76 Ku per Ha, maka tafsiran pendapatan bersih Rp 916.600,00 dengan waktu tunggu sekitar 16 bulan. Jika petani tebu tersebut bekerja pada lahan sendiri dan tanaman tebu sebagai sumber pendapatan utama, maka tafsiran pendapatan bersih petani tebu sekitar Rp 14.235,00 per Kapita per Bulan. Ini berarti bahwa petani tebu tersebut adalah petani *near-poor* (hampir miskin) bila digunakan garis kemiskinan (sekitar Rp 13.295/Kapita/Bulan untuk tahun 1990). Petani tebu yang tergolong mampir miskin akan menjadi miskin kembali apabila terjadi kegagalan panen atau sebab lain. Kondisi tersebut diperburuk lagi dengan sebanyak 38,7% petani tebu yang berlahan sempit masih dapat digolongkan sebagai petani miskin atau tidak dapat mengandalkan tanaman

tebu untuk terlepas dari garis kemiskinan. Atau dengan kata lain, penghasilan tanaman tebu tidak bisa dijadikan sumber penghasilan keluarga utama tanpa penghasilan tambahan lain, sehingga petani tebu harus mencari tambahan penghasilan di luar tanaman tebu. Akibatnya adalah petani tebu mengalami *trade off* antara mengelola tanaman intensif dengan mencari tambahan penghasilan.

Dalam mengusahakan tebu, hanya 25,1% petani menjadikan tanaman tebu sebagai sumber penghasilan utama, sedangkan sebanyak 54,8% petani menjadikan penghasilan tanaman tebu sebagai penghasilan tambahan. Kondisi tersebut semakin menyakinkan bahwa tanaman tebu hanya dapat diandalkan sebagai penghasilan tambahan. Maka, petani tebu yang berlahan sempit, produktivitas lahan rendah (lahan-lahan marginal), tidak memiliki modal usaha, dan pertanian tebu merupakan pekerjaan pokok, adalah petani miskin, dengan penghasilan bersih sekitar Rp 7.120,00 per Kapita per Bulan. Kondisi inilah merupakan kondisi delimitas bagi pengelolaan program TRI. Pada satu sisi program TRI menjadi program yang sejenis dengan program pemerataan dan pengentasan kemiskinan sehingga program ini bukan program yang menjanjikan keuntungan besar bagi bank penyalur kredit dan pabrik gula, tetapi pada sisi lain program TRI perlu menghasilkan keuntungan finansial agar program TRI tetap layak untuk dilanjutkan.

Program TRI ini telah dianggap menarik dan menguntungkan bagi 45% petani tebu. Tetapi, sebanyak 37% petani masih merasa terpaksa dan wajib menanam tebu. Ini berarti bahwa program TRI telah memberikan keuntungan finansial bagi

petani tebu berlahan luas dan penghasilan tebu sebagai tambahan pendapatan keluarga. Bagi petani yang berlahan sempit, program TRI belum dapat dikatakan menguntungkan dan menarik. Meskipun demikian, program TRI ini telah menambah alternatif penggunaan lahan (marginal) dan meningkatkan kehidupan keluarga.

Insentif berupa kredit, kepastian jadwal tebang dan giling, dan pendapatan menjadi faktor penentu bagi petani untuk memilih tanaman tebu dengan program TRI. Presepsi prosedur kredit TRI telah dianggap tidak memberatkan. Sebanyak 12% petani masih menganggap prosedur kredit memberatkan, sedangkan 80% petani tidak merasa keberatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa petani telah menerima prosedur kredit. Ini berarti pula bahwa petani telah mempergunakan kredit bank untuk membiayai usahanya, meskipun hal ini masih terbatas kepada petani tebu yang mengikuti program TRI.

Penyebab kemacetan kredit disebabkan dua hal yang utama, yaitu hasil yang diterima petani terlalu kecil dibandingkan kredit yang harus dilunasi (35%), dan petani pemilik tidak mengetahui kredit tersebut (60,3%). Ketidaktahuan mengenai kredit ini disebabkan karena lahan petani tersebut disewakan kepada petani lain atau ketua kelompok sehingga urusan kredit dan pelunasannya hanya diketahui oleh petani penyewa atau ketua kelompok. Kondisi ini dapat menguntungkan dan sekaligus merugikan. Keuntungan yang diperoleh adalah tanaman tebu dapat diusahakan pada hamparan areal yang luas (mengelompok), tetapi kerugian yang timbul adalah petani tebu tetap menjadi buruh dilahannya dan menanggung kerugian apabila petani yang menyewa atau

ketua kelompok tani mengalami kredit macet.

Waktu tebang, angkut dan giling ditentukan oleh pabrik gula. Dari responden yang berhasil ditemui, sebagian besar yaitu 50% dari responden merasa penebangan tebunya tepat pada waktunya. Sebagian lagi (31,33 %) merasa bahwa penebangan tebu tersebut kadang-kadang terlambat. Hal itu dapat dihindari dengan menentukan jadwal penebangan dan giling telah direncanakan dan dikirim kepada petani melalui KUD. KUD dan kelompok tani mengusahakan penanaman tebu yang mengelompok secara serempak dan seragam sehingga mempermudah pengaturan penebangan dan pengangkutan tebu.

Jika dibandingkan hasil panen tanaman tebu dari petani yang ikut program TRI dengan petani yang tidak ikut program TRI dapat diikuti pada tabel 1. Sebagian besar petani (45,10%) mengatakan bahwa hasil panen tebu yang ditanam oleh petani peserta TRI dan petani yang tidak mengikuti TRI relatif sama baiknya. Jadi wajarlah jika ada petani yang dulunya pernah mengikuti program TRI dan ternyata sekarang sudah tidak ikut program TRI lagi.

TABEL 1.
PERBANDINGAN HASIL TANAMAN
TEBU BAGI PETANI TRI DAN NON-
TRI PADA TAHUN 1992/1993

HASIL	TRI	Non-TRI	Tebu
1. TRI > NON TRI	36,0	3,9	28,0
2. TRI = NON TRI	28,0	45,2	32,5
3. TRI < NON TRI	6,7	7,8	6,5
4. Tidak memberi jawaban	29,3	43,1	33,0
Jumlah :	100,0	100,0	100,0
Jumlah Responden :	150	50	200

Sumber : Diolah dari data primer

Pabrik gula mempunyai andil yang besar bagi kelayakan tebu yang diusahakan, karena pabrik gula menjadi pembimbing teknis kepada petani, penentu terakhir dari rendamen tebu yang dihasilkan petani. Disamping, usaha-usaha pabrik gula meningkatkan efisiensi produksi dan menghilangkan "kekakuan" fungsi produksi yang dimiliki pabrik gula.

Bank mempunyai peran dalam membiayai usahatani tebu. Modal dari bank ini menjadi modal kerja yang utama, karena petani TRI adalah petani gurem, lahan tebu yang diusahakan adalah lahan marginal dengan nilai rendamen tebu lebih kecil dari 8 persen, dan tidak memiliki sumber keuangan bagi pertanian yang diusahakannya. Berdasarkan tabel 2 dan 3, pinjaman bank menjadi sumber utama petani TRI, sedangkan petani TRB (Tebu Rakyat Bebas) mengandalkan modal sendiri.

TABEL 2.
SUMBER PEMBIAYAAN PETANI TRI
DAN NON-TRI
PADA MUSIM TANAM 1991/1992

SUMBER PEMBIAYAAN	TRI	Non-TRI
1. Modal Sendiri	45	37
2. Bank	95	2
3. Pabrik Gula	5	9
4. Lain-lain	20	4

Sumber : Diolah dari data primer

TABEL 3.
SUMBER PEMBIAYAAN PETANI TRI
DAN NON-TRI

SUMBER PEMBIAYAAN	TRI	Non-TRI
1. Modal Sendiri	45	37
2. Bank	95	2
3. Pabrik Gula	5	9
4. Lain-lain	20	4

Sumber : Diolah dari data primer

PADA MUSIM TANAM 1992/1993

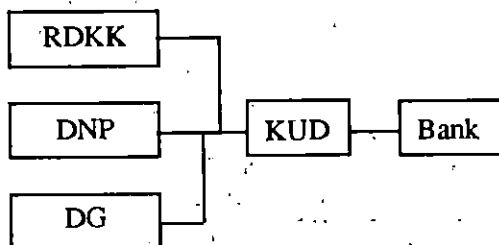
Kredit murah dari perbankan adalah harapan bagi petani gurem tersebut. Kemurahan pinjaman tersebut tidak hanya dari tingkat bunga yang menarik, tetapi juga didasarkan kepada ketepatan pemberian pinjaman dan kemudahan prosedur perkreditan. Keterlambatan kredit akan mengakibatkan petani tidak mampu melaksanakan budidaya tebu yang dianjurkan oleh pabrik gula dan disbun, sehingga hasil tebu yang dihasilkan tidak mencapai rendamen tebu yang optimal. Nilai rendamen yang tidak optimal ini akan mempengaruhi nilai hasil produksi yang harus dibayarkan kepada petani. Akibatnya adalah pendapatan yang diperoleh dari tanaman tebu tersebut tidak mencukupi kredit yang dikeluarkan atau petani tidak memiliki ekstra pendapatan dari hasil produksi tanaman tebu.

Keterlambatan pemberian kredit ini dapat berakibat petani mengijonkan tanaman tebu atau menyewakan tanaman tebu kepada petani lain atau ketua kelompok tani. Akibatnya adalah petani tidak mengusahakan tanaman tebu secara sungguh-sungguh, dan selanjutnya

tunggakan kredit tidak dapat dihindari.

KUD dan Kelompok Tani merupakan kelembagaan bagi petani untuk meningkatkan kemampuan menawar, meningkatkan kesejahteraan bersama dan mempermudah koordinasi. Hal ini akan terwujud bila KUD dan Kelompok Tani dapat berfungsi. Tugas pembinaan ini dilakukan oleh Dinas Koperasi yang mempunyai misi membina koperasi secara keseluruhan. Ketidakpercayaan anggota kepada pengurus KUD akan berakibat petani tidak tertarik mengikuti program TRI. Peran tambahan KUD adalah sebagai pendaftaran peserta TRI, penyaluran kredit, pembagian SHU dari tanaman tebu, dan penyaluran saprotan.

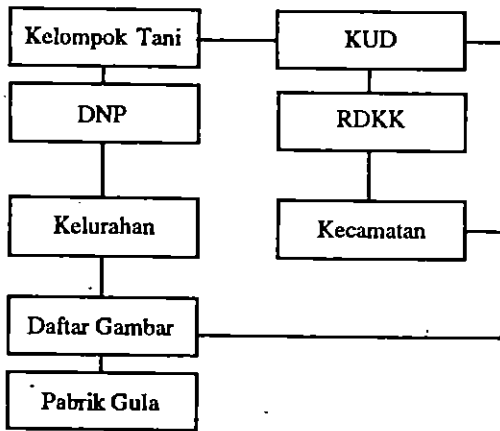
Keterpaduan antar instansi merupakan penentu bagi menariknya komoditi tebu sebagai alternatif yang menguntungkan bagi petani. Prosedur dan struktur pengelolaan program TRI dapat diperpendek dari 6 instansi menjadi 4 instansi (pada pengajuan kredit) dan 3 instansi (pada penyelesaian kredit), dengan perincian sebagai berikut:



Pengajuan Kredit

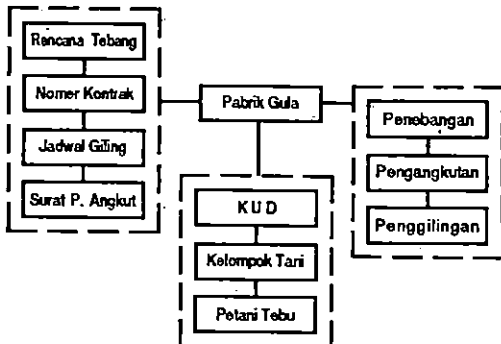
Kredit diajukan oleh KUD dengan persyaratan RDKK yang telah disahkan oleh Kecamatan (dibantu oleh dinas dan instansi yang terkait), DNP yang diajukan oleh Kelompok Tani dan telah disahkan

oleh Kelurahan, dan DG yang diajukan oleh Pabrik Gula dan telah disetujui oleh Kelurahan. Mekanisme pengesahan dan persetujuan RDKK, DNP dan DG

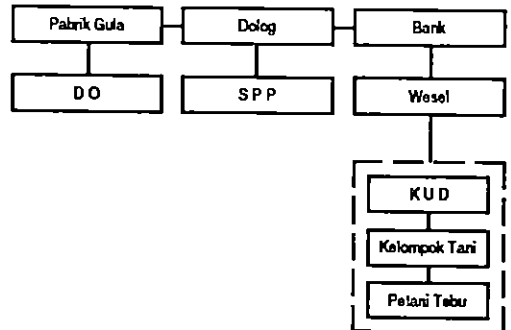


ditunjukkan dengan:
Penyelesaian Kredit

Setelah umur tebu telah mencapai rendamen optimal, pabrik menerbitkan rencana tebang, nomer kontrak, jadwal giling dan surat perintah angkut dan dikirimkan kepada KUD. Keempat dokumen tersebut dilaksanakan di lapangan dengan dibantu oleh petani dan kelompok tani.



Setelah proses giling diselesaikan, pabrik gula mengirim gula ke Dolog dan menerbitkan delivery order. Setelah gula diterima, maka Dolog membua surat perintah pembayaran kepada Bank Penyelenggara Program TRI. Bank menerbitkan wesel sebesar sisa hasil usaha kepada petani tebu melalui KUD dan



Kelompok Tani.

6. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa:

1. Program TRI merupakan alternatif dan harapan meningkatkan pendapatan petani yang memiliki lahan sempit (petani gurem), tidak memiliki permodalan, dan memiliki lahan marginal.
2. Belum menariknya petani melakukan intensifikasi lahan tebu dan masih diperlukan pendapatan tambahan di luar tanaman tebu merupakan kendala bagi perkembangan program TRI disamping kendala sosial ekonomi petani dan lahan yang dimilikinya.
3. Pabrik gula memiliki peran yang penting karena pabrik gula membantu menekan biaya produksi petani dengan teknologi budidaya tebu dan menjadwalkan yang

konsisten, dan mempertahankan rendamen tebu yang telah dicapai oleh petani.

4. Bank mempunyai andil dalam program TRI, karena kredit murah dan tepat waktu pencairan kredit merupakan insentif bagi petani untuk memilih tanaman tebu.
5. KUD dan Kelompok Tani merupakan kelembagaan bagi petani untuk meningkatkan kemampuan menawar, meningkatkan kesejahteraan bersama dan mempermudah koordinasi. Pada saat ini, peran KUD masih sebagai penyalur saprotan dan kredit.
6. Dikotomi pengelolaan program TRI masih terjadi antara pabrik gula (pihak pemerintah) dan petani sehingga hubungan antara pabrik gula dengan petani kurang harmonis dibandingkan hubungan petani dengan pedagang.
7. Keterpaduan antar instansi merupakan penentu bagi menariknya komoditi tebu sebagai alternatif yang menguntungkan bagi petani. Mekanisme pengelolaan program TRI dapat diperpendek dari 6 instansi menjadi 4 instansi pada pengajuan kredit dan 3 instansi pada penyelesaian kredit.

Saran yang dapat diajukan adalah

1. Meringkas mata rantai birokrasi program TRI dari 6 instansi menjadi 4 instansi pada pengajuan kredit dan 3 instansi pada penyelesaian kredit.
2. Memfungsikan KUD dan Kelompok Tani sebagai alat perjuangan ekonomi petani anggotanya dan meningkatkan partisipasi anggota.
3. Pihak bank membantu menertibkan dan meningkatkan mutu administrasi KUD dan Kelompok Tani, serta membantu

menyalurkan dana ke petani tebu.

4. Insentif bagi petani tebu dapat ditingkatkan dengan ketepatan dalam memenuhi jadwal yang telah diputuskan bersama baik tebang, angkut, giling ataupun perkreditan. Disamping, peningkatan produktifitas budidaya tebu melalui peningkatan teknologi budidaya dan cara kerja usahatani tanaman tebu.

Daftar Pustaka

- Bank Bumi Daya, *Gula Tinjauan Produksi dan Pemasaran Gula di Indonesia*, Bank Bumi Daya, Jakarta, 1983.
- Biro Pusat Statistik, *Statistik Indonesia 1991*, BPS, Jakarta, 1992.
- Hamid, Edy Suandi, "*Beberapa Permasalahan Tebu Rakyat Intensifikasi dan Industri Gula di Indonesia*", Makalah Mengenai Masalah Ekonomi yang Aktual, FE UII, Yogyakarta, 1994.
- Mubyarto, *Masalah Industri Gula di Indonesia*, BPFE, Yogyakarta, 1984.
- Mubyarto dan Daryanti, *Gula : Kajian Sosial Ekonomi*, Aditya Media, Yogyakarta, 1991.
- Republik Indonesia, *Nota Keuangan dan RAPBN 1993/1994*, Republik Indonesia, Jakarta, 1993.
- Republik Indonesia, *Pidato Kenegaraan Presiden RI Soeharto di depan Sidang DPR*, 15 Agustus 1992, Republik Indonesia, Jakarta, 1992.
- Simanjuntak, Djisman S., "*Tebu Rakyat Intensifikasi, Peluang Perbaikan dan Kebijakan Alternatif*", Makalah Seminar Peranan Industri Gula dalam Pembangunan Nasional, FE Unair, Surabaya, 1985.
- Socbroto, R., *Tebu Rakyat*, Terate,

- Bandung, 1992.
- Soemartojo (Ed), *Perkebunan Indonesia di Masa Depan*. Yayasan Agro Ekonomika, Jakarta, 1984.
- Sunanto, Hatta, "*Kredit Usahatani dalam Konstelasi Pelaksanaan Tebu Rakyat Intensifikasi*", Makalah Mengenai Masalah Ekonomi yang Aktual, FE UII, Yogyakarta, 1994.
- Supriyadi, Ahmad, *Rendamen Tebu Likuliku Permasalahannya*, Kanisius, Yogyakarta, 1992.
- Tim Penulis PS, *Pembudidayaan Tebu di Lahan Sawah dan Tegalan*, Swadaya, Jakarta, 1992.
- Tim Study Gula, *Sistem Tataniaga Tebu dan Gula di Beberapa Negara Asia*, Tim Study Gula, Bulog, Jakarta, 1990.
- Winarno, F. G., dan A. T. Birowo, *Gula dan Pemanis Buatan di Indonesia*, Dewan Gula Indonesia, Jakarta, 1988.
- Varian, Hal R., *Intermediate Microeconomics : A Modern Approach*, Second Edition, W. W. Norton and Company, New York, 1990.
-